

**MABDA SIYASI DALAM KEBIJAKAN POLITIK
DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ERA MUHAJMIN
ISKANDAR (2005-2024)**



Oleh:

Muhammad Wildanul Hishom

NIM. 23200011087

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A)

Program Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-659/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : Mabda Siyasi Dalam Kebijakan Politik DPP Partai Kebangkitan Bangsa Era Muhaimin Iskandar (2005-2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WILDANUL HISHOM, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011087
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.

SIGNED

Valid ID: 6a559a4133279



Penguji II

Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6a5853159e3a3



Penguji III

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6a586cdf944c6



Yogyakarta, 08 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6a5d71b7b4cee

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Wildanul Hishom
NIM : 23200011087
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentersasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Mei 2026.
Saya yang menyatakan,



Muhammad Wildanul Hishom
NIM. 23200011087

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildanul Hishom
NIM : 23200011087
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2026.
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Wildanul
Hishom, NIM. 23200011087

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**"MABDA SIYASI DALAM KEBIJAKAN POLITIK
DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ERA MUHAJIRIN ISKANDAR
(2005-2026)"**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wildanul Hishom
NIM : 23200011087
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (M.A.)

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2026

Pembimbing,



Ahmad Norma Permata, S.Ag., Ph. D, M.A
NIP. 1971207 200901 1003

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Mabda' Siyasi dalam kebijakan politik Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) era kepemimpinan Muhaimin Iskandar periode 2005–2024. Mabda' Siyasi merupakan landasan ideologis sekaligus ruh perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa yang memuat nilai-nilai kejujuran (*as-shidqu*), amanah (*al-amanah*), keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*al-syuro*), dan konsistensi (*al-istiqomah*) yang bersumber dari tradisi Islam *Ahlussunnah wal Jamaah* dengan semangat kebangsaan Pancasila. Sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama pada 23 Juli 1998, Partai Kebangkitan Bangsa sejak awal berdirinya telah memposisikan Mabda' Siyasi bukan sekadar dokumen ideologis, melainkan panduan operasional yang memandu setiap langkah kebijakan, strategi koalisi, rekrutmen kader, hingga sikap partai terhadap berbagai isu nasional. Persoalan utama yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana Mabda' Siyasi diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan politik Partai Kebangkitan Bangsa dan bagaimana hasil dari kebijakan tersebut di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar selama dua dekade memimpin partai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori strukturasi Anthony Giddens yang memandang hubungan antara agen yakni DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan struktur yakni kebijakan publik sebagai proses yang saling membentuk secara dinamis dan berkelanjutan. Giddens menegaskan bahwa agen dan struktur tidak berdiri sendiri melainkan saling terlibat dalam satu dualitas yang terus bergerak. Dalam konteks penelitian ini, DPP Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa sebagai agen berperan aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, sementara Mabda' Siyasi berfungsi sebagai struktur nilai yang memberi arah, batasan, dan legitimasi bagi setiap tindakan politik yang diambil. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa, anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan kader Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan sepanjang Maret hingga Mei 2026. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mabda' Siyasi memiliki tiga lapis kerangka perjuangan yang saling menopang. Pertama, landasan filosofis yang menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah Tuhan sehingga setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Tuhan. Kedua, nilai dasar perjuangan yang terdiri dari *as-shidqu*, *al-amanah*, *al-'adalah*, *al-musawa*, *al-syuro*, dan *al-istiqomah* sebagai standar perilaku politik yang wajib melekat pada seluruh kader dan pimpinan. Ketiga, kerangka *maqashid syariah* yang mencakup perlindungan jiwa (*hifdzu al-nafs*), agama (*hifdzu al-din*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan harta (*hifdzu al-mal*) sebagai tolok ukur konkret untuk menilai keberpihakan setiap kebijakan publik yang diperjuangkan Partai Kebangkitan Bangsa kepada kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Implementasi Mabda' Siyasi di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar bertumpu pada tiga pilar utama yaitu *ukhuwah* tiga dimensi yang meliputi persaudaraan keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan; kaderisasi berbasis kompetensi dan integritas yang berjenjang dari loyalis hingga pelopor; serta kontrol kekuasaan yang institusionalistik untuk

mencegah sentralisasi dan kultus individu. Hasilnya terbukti nyata dalam tren elektoral yang konsisten meningkat: dari 28 kursi pada Pemilu 2009 ketika Partai Kebangkitan Bangsa nyaris tidak lolos ambang batas parlemen, menjadi 47 kursi pada 2014, 58 kursi pada 2019, hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Partai Kebangkitan Bangsa dengan 68 kursi pada Pemilu 2024. Capaian ini tidak sekadar prestasi elektoral, melainkan buah dari konsistensi penerapan nilai-nilai *Mabda' Siyasi* dalam membangun soliditas internal partai dan memperluas inklusivitas Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai yang melampaui batas-batas identitas keagamaan dan kultural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Mabda' Siyasi* telah terbukti menjadi panduan perjuangan yang hidup dan relevan sepanjang era kepemimpinan Muhaimin Iskandar, menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai model unik partai Islam yang mampu memadukan nilai-nilai religius, semangat kebangsaan, dan komitmen terhadap demokrasi serta keadilan sosial secara harmonis. Kepemimpinan Muhaimin bukan sekadar fenomena elektoral, melainkan manifestasi konkret dari humanisme religius Partai Kebangkitan Bangsa yang diterima dunia sebagai *role model* politik Islam yang rahmatan lil alamin. Namun demikian, tantangan ke depan tetap besar karena konsistensi (*al-istiqomah*) menuntut evaluasi yang terus-menerus agar *Mabda' Siyasi* tidak berhenti sebagai narasi ideologis semata, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap kebijakan publik yang membawa kesejahteraan nyata, keadilan yang merata, dan martabat yang terjaga bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Kata Kunci: *Mabda' Siyasi, Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Kebijakan Politik*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segalanikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Mabda Siyasi dalam Kebijakan Politik DPP Partai Kebangkitan Bangsa Era Muhaemin Iskandar (2005-2024)”. Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-Nya.

Penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister pada Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam proses penyusunan tesis ini, terdapat berbagai kendala dan hambatan sehingga penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini tidak dapat lepas dari bantuan, dorongan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang selama ini mendukung proses penelitian dan penyusunan tesis ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh mahasiswa.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai motivasi dan dorongan kepada mahasiswa pascasarjana.
3. Najib Kailani S.Fil.I., M.A., Ph. D selaku Ketua Program Studi

Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung dan membantu para mahasiswa dalam proses pembelajaran.

4. Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam perkuliahan.
5. Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.
6. Seluruh pihak yang mendukung terselesaikannya studi magister yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

Tesis ini tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna dan baik dari segi penulisan maupun analisisnya. Oleh karena itu, terbukanya kritik dan saran guna penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2026
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Wildanul Hishom

KATA PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang senantiasa melimpahkan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas dalam setiap langkah kehidupan penulis.

Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.

Tak lupa, penulis persembahkan kepada segenap Civitas Akademika Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, khususnya para Dosen Pembimbing dan Dosen Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu, bimbingan, serta arahan yang sangat berharga.

Serta kepada siapa pun yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Setiap Pagi adalah lembaran baru dari buku kehidupan dan kau adalah penulisnya. Tuliskan cerita yang membuatmu Bangga, jangan biarkan hari-hari sekedar menjadi halaman kosong"



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	1
ABSTRAK.....	5
KATA PENGANTAR	7
KATA PERSEMBAHAN.....	9
MOTTO.....	10
DAFTAR ISI	11
DAFTAR GAMBAR.....	13
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN DAN SIGNIFIKASI	6
D. KAJIAN PUSTAKA	8
E. KERANGKA TEORITIS.....	10
F. METODE PENELITIAN.....	15
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	19
BAB II PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN KEPIMPINAN KETUA	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MUHAIMIN ISKANDAR	21
A. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.....	21

B. KEPIMPINAN KETUA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MUHAIMIN ISKANDAR (2005-2024)	26
BAB III PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	34
A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	34
B. PARTAI POLITIK	38
C. PANDANGAN PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.....	45
BAB IV IMPLEMENTASI MABDA SIYASI PADA NILAI-NILAI PERJUANGAN POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	51
A. MABDA SIYASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	51
B. PARTAI TERBUKA (NASIONALIS DAN ISLAMIS) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	66
C. IMPLEMENTASI MABDA SIYASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	71
D. KEPIMPINAN MUHAIMIN ISKANDAR KETUA UMUM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	94
1. Kekuatan dan kelemahan Kepimpinan Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar 2005-2024.....	100
E. MABDA SIYASI SEBAGAI NILAI, ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	106
BAB V PENUTUP.....	110
A. KESIMPULAN.....	110
B. SARAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HIERARKI REGULASI PARTAI POLITIK:	120
LAMPIRAN LAMPIRAN	121
CURRICULUM VITAE	133
DATA PRIBADI	133
RIWAYAT PENDIDIKAN	133
ARTIKEL YANG TELAH TERBIT	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Landasan filosofis Partai Kebangkitan Bangsa.....	69
Gambar 4. 2 Landasan Nilai dasar perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa.....	70
Gambar 4. 3 Maqashid Syariah dalam Politik Partai Kebangkitan Bangsa.....	78
Gambar 4. 4 Strategi Perjuangan Politik Partai Kebangkitan Bangsa.....	80
Gambar 4. 5 Implementasi Mabda Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa.....	81
Gambar 4. 6 Kerangka Pemikiran Mabda Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, Perkembangan partai politik di Indonesia semakin kabur dalam hal ideologi dan nilai-nilai perjuangan untuk menyejahterakan masyarakat. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia¹ merupakan salah satu fungsi utama partai politik. Partai politik memainkan peran krusial dalam sistem demokrasi, bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.² Mereka merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi negara. Respons yang menghasilkan kebijakan-kebijakan tersebut biasanya didasarkan pada ideologi serta prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh partai.

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempati posisi strategis di dalam sistem politik nasional melalui proses legislasi di tingkat nasional. Partai Kebangkitan Bangsa juga ikut memainkan peran dalam merumuskan dan mengarahkan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh para politisi Partai Kebangkitan Bangsa di pemerintahan. Sebagai partai yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam moderat, kebangsaan, dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan partai politik lain, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki pedoman politik tersendiri yang disebut *Mabda' Siyasi* sebagai

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008,” diakses 24 Juni 2024.

² Thomas Meyer, “Peran partai politik dalam sebuah sistem demokrasi : sembilan tesis,” 2012, 3, 2012.

landasan ideologis yang memandu semua kebijakan dan strategi politik menjadikannya partai yang khas dalam merespons tantangan sosial, ekonomi dan strategi kebijakan politik Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tahun 1998 tepatnya 23 Juni oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU)³ dengan tujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat, kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Penerapan prinsip-prinsip Mabda Siyasi ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. Penelitian ini, melihat bagaimana implementasi Mabda' Siyasi berpengaruh langsung terhadap kebijakan yang diambil oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Penelitian ini berusaha membedah kebijakan yang telah diterapkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa selama era ketua umum Muhaemin Iskandar, mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan yang dicetuskan dan nilai-nilai yang seharusnya terkandung dalam Mabda' Siyasi.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah menyusun berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat demokrasi.⁴ Tantangan pertama yang harus dihadapi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam implementasi kebijakannya adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan latar belakang etnis, budaya, dan agama yang beragam, kebijakan yang diimplementasikan haruslah inklusif dan mendorong toleransi serta harmoni sosial. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa, yang

³ Annisa, “*Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)* - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut,” 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-partai-kebangkitan-bangsa-pkb/>.

⁴ Lisna Alvia dan Uin Syarif Hidayatullah, “*Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Setelah Era Reformasi 1998-2009*,” 2015.

mengutamakan moderasi dan toleransi, harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Penerapan Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa harus memastikan bahwa nilai-nilai moderasi dan toleransi menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan.

Kedua, dinamika politik nasional yang sering kali kompleks menuntut kemampuan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa untuk menavigasi berbagai kepentingan politik yang berbeda. Persaingan antar partai politik, kepentingan kelompok, dan perubahan lanskap politik dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa harus dapat menjaga keseimbangan antara prinsip Mabda' Siyasi dan tuntutan politik praktis.

Ketiga, aspek ekonomi juga memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan yang diimplementasikan.⁵ Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi signifikan, termasuk tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kebijakan yang diimplementasikan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa harus mampu menjawab tantangan ini dengan solusi yang berkelanjutan dan inklusif, selaras dengan prinsip kesejahteraan sosial yang menjadi poin Mabda Siyasi Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi dan institusi lokal.⁶

Penerapan Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa memerlukan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan yang telah diimplementasikan. Salah

⁵ imamudin yuliadi, "ASPEK EKONOMI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH | yuliadi | Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan," April 2001.

⁶ Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (25 Februari 2021).

satu fokus utama adalah bagaimana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Di sisi lain, peran serta masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan juga menjadi faktor kunci keberhasilan.⁷ Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan yang diimplementasikan. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa perlu mengevaluasi sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses ini dan bagaimana tanggapan mereka terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Feedback dari masyarakat akan memberikan insight yang berharga dalam memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan di masa mendatang.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, Pusat Partai Kebangkitan Bangsa juga perlu memperhatikan aspek kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi antara partai politik, pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.⁸ Evaluasi terhadap kerjasama ini akan membantu dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk memperkuat implementasi kebijakan yang berbasis pada Mabda' Siyasi Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan melakukan analisis komprehensif terhadap implementasi strategi kebijakan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, diharapkan dapat ditemukan praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di daerah lain. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga

⁷ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (5 Desember 2021).

⁸ Hairunnisa dan Wisda Aprilia Syaka, "Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan)," 29 Juli 2022.

prinsip-prinsip *Mabda' Siyasi* dapat terwujud secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai bagaimana ideologi partai mempengaruhi kebijakan publik. Dengan fokus pada rasionalisasi perjuangan politik dan spirit pada *Mabda' Siyasi* untuk pengambilan kebijakan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penting: "Bagaimana kebijakan politik Partai Kebangkitan Bangsa yang diambil menciptakan kebijakan publik yang membawa kesejahteraan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat".

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks partai politik Islam di Indonesia. Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap implementasi *Mabda' Siyasi* dalam kebijakan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dengan fokus pada bagaimana kebijakan partai diterjemahkan menjadi tindakan konkret di pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat strategi kebijakan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *mabda siyasi* dalam kebijakan politik Partai Kebangkitan Bangsa?
2. Bagaimana *mabda siyasi* diterapkan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam implementasi kebijakan publik?

3. Bagaimana kepemimpinan Muhaimin Iskandar dalam penerapan *mabda' siyasi*?

C. Tujuan dan Signifikasi

Sebuah penelitian tidak akan berarti jika tidak tahu apa yang menjadi tujuan dan manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari penelitian.

Tujuan Penelitian

1. Memahami penerapan Mabda Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan menganalisis bagaimana Mabda Siyasi Pusat Partai Kebangkitan Bangsa diterapkan dalam strategi kebijakan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Penelitian ini akan meneliti proses perumusan kebijakan, langkah-langkah implementasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik dalam konteks kebijakan publik di Indonesia.
2. Menganalisis Hasil Kebijakan dari Implementasi Mabda' Siyasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil kebijakan yang diperoleh dari implementasi Mabda' Siyasi Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini mencakup analisis terhadap dampak kebijakan publik yang dihasilkan, kontribusi Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam dinamika politik, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Mabda' Siyasi.
3. Mengetahui Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pengelolaan Kebijakan Publik. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi peran Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam pengelolaan kebijakan politik sebagai kepentingan publik. Penelitian

ini akan meneliti bagaimana Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa mengelola kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta bagaimana mereka memastikan bahwa prinsip-prinsip Mabda' Siyasi terintegrasi dalam kebijakan yang dihasilkan.

Signifikansi Penelitian

1. Kontribusi terhadap Kajian Politik dan Kebijakan Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik politik dan kebijakan publik dalam konteks Partai Kebangkitan Bangsa. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti politik, akademisi, dan praktisi dalam memahami dinamika politik dan strategi kebijakan partai politik di Indonesia.
2. Relevansi Terhadap Pengembangan Partai Politik. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi Partai Kebangkitan Bangsa dan partai politik lainnya dalam merancang strategi politik yang lebih efektif dan inklusif. Analisis tentang implementasi Mabda' Siyasi juga dapat membantu dalam meningkatkan representasi dan responsivitas partai terhadap aspirasi masyarakat.
3. Implikasi Praktis untuk Kebijakan Politik. Penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih baik. Dengan memahami pengalaman Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengelola kebijakan publik, pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan dampak

politik Partai Kebangkitan Bangsa dalam kebijakan publik, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori politik, praktik kebijakan publik, dan strategi politik partai di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hasil penelitian serta karya akademik yang relevan dengan subjek yang sama, yaitu implementasi Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa dan pengelolaan kebijakan publik oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk memperlihatkan sejauh mana penelitian yang telah dilakukan, membedakan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan, serta menunjukkan kontribusi penelitian ini terhadap keilmuan di bidang kajian yang sama. Sejauh pengamatan penulis kajian terkait Mabda' Siyasi tidak banyak dilakukan diberbagai karya, baik berupa buku, artikel, tesis, skripsi, disertasi namun isi dari Mabda' Siyasi telah disinggung di platform resmi web atau kajian melalui media sosial dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kajian-kajian yang ada menyorot terkait prinsip Mabda' Siyasi sebagai nilai landasan dalam arah politik Partai Kebangkitan Bangsa penulis jadikan landasan untuk penelitian.

Karena kajian terkait Mabda' Siyasi tidak banyak dibahas dalam artikel maka pada hal penelitian ini menjadi sebuah kebaruan dalam pustaka akademik kedepan. Dalam upaya penyelesaian penelitian ini beberapa kajian yang berasal dari platform media sosial tersebut dapat menjadi acuan. Telaah buku Manifesto Partai Kebangkitan Bangsa juga dapat menjadi penyumbang tulisan, di sini dituliskan tentang kompleksitas gerakan Partai Kebangkitan Bangsa mulai dari

sejarah hingga seluk beluk mengenai pergerakan partai. Serta banyak dalam bentuk penelitian ilmiah artikel yang membahas tentang kebijakan politik terutama para politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus pandangan partai politik dalam hal kebijakan. termasuk peran mereka dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah tempat Partai Kebangkitan Bangsa memiliki basis elektoral yang kuat.

Penelitian ini akan membedakan dirinya karena sebuah hal baru dalam penulisan yang membahas terkait Mabda' Siyasi dibanding penelitian terdahulu yang belum ada penyinggungan terkait konsep Mabda' Siyasi ini. Penulis dengan dua fokus utama. Pertama, penelitian ini akan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap implementasi Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa dalam kebijakan pemerintahan secara spesifik. Di samping penelitian lain yang cenderung bersifat deskriptif, penelitian ini akan lebih menekankan pada pengetahuan konkret terhadap keberhasilan implementasi kebijakan politik tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya.

Kedua, penelitian ini akan membedakan dirinya dengan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana kebijakan politik partai yang ditransformasikan kepada politisi Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengelola kebijakan publik dengan mempertimbangkan dinamika politik dan kebutuhan yang akomodatif. Sementara penelitian lain yang membahas terkait Partai Kebangkitan Bangsa tidak menyinggung relevansi kebijakan politik dan Mabda' Siyasi, penelitian ini akan lebih fokus pada analisis spesifik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat legislatif dan eksekutif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

wawasan yang lebih tajam dan mendalam tentang praktik politik dan kebijakan publik Partai Kebangkitan Bangsa serta respon partai yang spesifik.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan melalui kerangka teoritis sebagai fondasi penting dalam penelitian ilmiah yang membantu menjelaskan konsep-konsep utama, hubungan antar konsep, serta memberikan panduan untuk analisis data. Kerangka teori merupakan bagian dari pisau analisis yang digunakan dalam penelitian, berisi teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menganalisis implementasi Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa dalam kebijakan politik.

Agen (Anggota PKB)	Struktur (PKB Sebagai partai menerapkan Mabda Siyasi)	Dualitas
DPP PKB, fraksi DPR, juru bicara partai yang menafsirkan dan mengkomunikasikan nilai Mabda' Siyasi ke publik	Prinsip Aswaja (tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal) dalam Mabda' Siyasi sebagai kerangka makna berpolitik.	Ketika PKB mendukung kebijakan toleransi beragama di DPR, fraksi menggunakan narasi <i>Islam rahmatan lil 'alamin</i> dari Mabda' Siyasi sebagai justifikasi. Struktur memberi makna, agen

		mereproduksi makna itu ke ruang publik.
Ketua Umum PKB (Muhaimin Iskandar), Ketua Fraksi DPR, pengurus DPP yang menguasai agenda dan koalisi partai	Aturan koalisi, garis kebijakan partai, dan prinsip kebangsaan dalam Mabda' Siyasi sebagai dasar alokasi sumber daya politik.	DPP PKB memanfaatkan jaringan kiai NU sebagai sumber daya kuasa (dominasi alokasi) untuk mendorong kebijakan pro-pesantren (mis. RUU Pesantren 2019). Mabda' Siyasi melegitimasi mobilisasi sumber daya ini atas nama kepentingan umat.
Kader PKB di legislatif & eksekutif, ulama pendukung partai, serta masyarakat Nahdliyin sebagai pemilih yang	Mabda' Siyasi sebagai dokumen ideologis resmi yang memuat komitmen NKRI, Pancasila, dan nilai Aswaja, berfungsi sebagai norma legitimasi tindakan politik.	Kebijakan PKB tentang penolakan formalisasi syariat dianggap sah (legitimate) karena berpijak pada Mabda' Siyasi yang mengakui Pancasila. Masyarakat Nahdliyin menerima

menilai keabsahan kebijakan		kebijakan ini karena selaras dengan nilai pesantren, agen mereproduksi legitimasi struktur melalui dukungan elektoral.
-----------------------------	--	--

Teori strukturasi diperkenalkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yang membahas hubungan antara agen dan struktur. membahas tentang hubungan antara agen dan struktur. Meskipun agen dan struktur adalah dua elemen terpisah dalam masyarakat, mereka saling terkait, berhubungan, dan saling memengaruhi satu sama lain. Giddens menyatakan bahwa "agen terlibat dalam struktur dan struktur terlibat dalam agen." Lebih jauh, Ritzer menjelaskan yang dimaksudkan oleh Giddens bahwa setiap tindakan atau praktik sosial memerlukan struktur, dan setiap struktur memerlukan tindakan sosial.⁹ Agen, sebagai aktor, bertanggung jawab atas reproduksi tindakan sosial ini. Agen memiliki kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut, sementara struktur berfungsi sebagai peraturan yang mengatur tindakan agen dan sekaligus memberikan wadah dan dukungan kepada agen untuk melaksanakan tindakan tersebut. Giddens merujuk pada integrasi agen-struktur ini sebagai "dualitas".

⁹ Moch Syahri, "ANTHONY GIDDENS DAN TEORI STRUKTURASI," Pascasarjana Universitas Airlangga, 2015.

Konsep utama teori strukturasi adalah adanya agen dan struktur. Agen didefinisikan oleh Giddens sebagai aktor yang terlibat dalam suatu praktik atau tindakan, dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk mempertahankan atau mengubah praktik tersebut. Penekanan diberikan oleh Giddens pada fakta bahwa individu atau sekelompok orang adalah agen yang memiliki monitoring refleksi dalam mengontrol tindakan mereka sendiri dan orang lain, adanya rasionalitas tindakan berupa inovasi baru yang dilakukan secara konsisten, serta dorongan berupa motivasi dalam bertindak.¹⁰ Dengan demikian, lebih luas lagi agen dapat dianggap sebagai akses individu terhadap sumber daya.¹¹

Konsep dualitas antara agen dan struktur menekankan bahwa fokus dalam ilmu sosial seharusnya tidak hanya pada individu sebagai aktor atau struktur sebagai institusi, melainkan pada praktik sosial yang terorganisir dalam berbagai konteks.¹² Dalam penelitian ini, hubungan antara Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai agen dan kebijakan publik sebagai struktur menciptakan praktik sosial yang berulang dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan.

Pada fase legitimasi, dualitas agen dan struktur berlanjut pada tataran pembenaran oleh struktur secara lebih luas.¹³ Dalam konteks penelitian ini,

¹⁰ Turner, Jonathan H., ed. *Handbook of sociological theory*. Springer Science & Business Media, 2006.

¹¹ Anthony Giddens, "Teori Strukturasi: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010.

¹² Rahmat Muhammad dan Nuvida Raf, "PERUBAHAN SOSIAL DI KELURAHAN TELLO BARU MELALUI PROGRAM LORONG WISATA" 9, no. 1 (2023).

¹³ Anthony Giddens, "Teori Strukturasi: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010.

penting untuk memahami bagaimana legitimasi kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa di mata masyarakat, serta dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap implementasi Mabda' Siyasi. Dengan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens, peneliti ingin melihat bagaimana peran Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam penerapan Mabda' Siyasi pada kebijakan publik.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kesadaran agen (Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa) dan masyarakat dalam menghadapi kebijakan yang diterapkan. Giddens juga menjelaskan tentang kesadaran praktis, kesadaran diskursif, dan motivasi tidak sadar yang berperan dalam membentuk tindakan individu. Pada motivasi tidak sadar berhubungan dengan keinginan yang mendorong tindakan individu tentang alasan dibalik tindakannya. Lalu, kesadaran diskursif menekankan pada kemampuan individu dalam menjelaskan dan mendiskusikan tindakan. Sedangkan Kesadaran praktis mencakup pengetahuan yang digunakan tanpa berpikir secara mendalam, membuat tindakan yang dilakukan seringkali sulit dijelaskan secara eksplisit oleh individu. Kesadaran praktis mendorong praktik sosial yang berulang dan jarang dipertanyakan lagi, kemudian berubah menjadi suatu rutinitas yang dilakukan secara terus menerus setiap harinya.¹⁴ Dengan menganalisis kesadaran ini, penelitian akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa diterapkan dan diterima dalam konteks kebijakan publik.

¹⁴ Herry-Priyono, B. B. *Anthony Giddens: suatu pengantar..* Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.JL4.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan politik Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa dalam kebijakan publik Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Metode penelitian yang digunakan mencakup jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, untuk menitik beratkan pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk memahami konteks dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti.¹⁵ Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, yaitu implementasi Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa dalam kebijakan publik. Desain deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan kondisi aktual dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang langsung didapat dari wawancara mendalam dan pengamatan-terlibat (*participating observation*). Wawancara mendalam dengan Gielbran Muhammad Noor (Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa),

¹⁵ I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020),

Bambang Susanto (Bendahara umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa), Drs. Mohamad Toha, S.Sos., M.Si (DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa), KH Syamsudin (Kader Partai Kebangkitan Bangsa). Sedangkan pengamatan dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang dirasa relevan dengan topik penelitian. Data yang akan dikumpulkan didasarkan pada panduan wawancara dan panduan pengamatan yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian ini. Mengenai data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini mengandalkan studi pustaka, termasuk buku, artikel, publikasi cetak dan daring, serta data pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

- a. Wawancara : dilakukan dimana peneliti bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan jawaban sesuai tujuan penelitian. Diawali dengan wawancara terbuka, informan diberikan kebebasan untuk mengeluarkan buah pikir, pandangan dan perasaan tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah itu dilanjut dengan wawancara lebih terstruktur dengan acuan pada pedoman wawancara secara garis besar.¹⁶ Sehingga peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan yang tidak terdapat dalam panduan wawancara apabila ditemukan informasi atau isu penting yang menjadi perhatian peneliti.
- b. Observasi Partisipatif: Pengumpulan data melalui observasi bertujuan memberikan gambaran lengkap tentang situasi yang sedang diteliti,

¹⁶ Dr Sugiyono, *"Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,"* 2013.

termasuk semua kegiatan yang terjadi, serta memahami dengan baik menggunakan panca indera penciuman, penglihatan, pendengaran terkait bagaimana orang-orang terlibat didalamnya.¹⁷ Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan politik dan pemerintahan untuk mengamati secara langsung proses implementasi kebijakan.

- c. Dokumentasi: Pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi untuk melihat dan menganalisis dokumen yang disusun oleh subjek itu sendiri atau orang lain. Adanya dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi dari jenis dokumen seperti surat, arsip, hasil rapat, catatan harian, dan dokumen-dokumen penting pemerintah merupakan bahan yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam waktu tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti telah menganalisis jawaban dari informan. Jika hasil analisis awal jawaban informan dirasa kurang memuaskan, peneliti akan terus menanyakan pertanyaan tambahan hingga sejumlah langkah tertentu untuk memastikan keakuratan data. Untuk itu, peneliti menerapkan teknik analisis data Miles and Huberman dikenal juga sebagai metode analisis data interaktif, kegiatan dalam analisis kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, mendalam dan konsisten terhadap

¹⁷ "25 Abdul Fattah Nasution, *"Metode Penelitian Kualitatif"...* - Google Scholar," diakses 24 Oktober 2024,

pertanyaan penelitian yang diajukan, sehingga data yang diperoleh mencapai pada kejenuhan data. Analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁸ Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup:

a. Reduksi data

Proses reduksi data dilakukan dengan menghimpun hasil penelitian, termasuk data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul secara menyeluruh, peneliti menyusun dan mengelompokkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga menghasilkan data yang kredibel. Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi data dengan menyederhanakan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dalam proses reduksi data, data yang disederhanakan harus dapat mewakili keseluruhan data yang telah dikumpulkan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya proses penyajian data peneliti berupaya untuk menampilkan dan memaparkan data dengan jelas melalui narasi. Selain itu akan penyajian data dilakukan menggunakan tabel, grafik, maupun gambar agar lebih mudah dipahami apa yang terjadi, dan memudahkan rencana kerja selanjutnya yaitu proses penarikan kesimpulan. Peneliti akan mengatur informasi dan sumber data secara sistematis, dengan

¹⁸ Sirajuddin Saleh, “*Analisis data kualitatif*” (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), <https://eprints.unm.ac.id/14856>.

mempertimbangkan klasifikasi masalah yang dirumuskan berdasarkan tingkat prioritas, serta mengorganisir yang sesuai dengan sub-tema tertentu.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir penarikan kesimpulan dengan menjawab fokus penelitian menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan kesimpulan secara deskriptif berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dikonfirmasi dengan menggunakan bukti yang kuat dan relevan dengan situasi lapangan. Selama proses ini, penulis berusaha untuk secara rinci menggambarkan hasil temuan dari penelitian, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian

5. Lokasi Penelitian ini adalah di kantor Dewan Pengurus Partai Partai Kebangkitan Bangsa. Serta penelitian mengenai dampak dan masyarakat akan dilakukan di dapil lima. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa dalam kebijakan politik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman praktik politik lokal dan kebijakan publik di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjawab pertanyaan penelitian terkait implementasi Mabda'

Siyasi di Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam kebijakan-kebijakannya.

Bab I Pendahuluan, mencakup informasi latar belakang penelitian yang berfokus pada pentingnya pada posisi Mabda Siyasi dalam partai, terlebih hal tersebut menjadi asas bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Bab ini juga memuat rumusan masalah, dan tujuan atau signifikansi penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan pustaka, kerangka teoritis, serta menjelaskan metode penelitian dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran awal terkait arah penelitian.

Bab II berisi: Kajian Pustaka terkait perjalanan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa dan perjalanan kepemimpinan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaemin Iskandar.

Bab III membahas terkait sistem partai politik dan bagaimana kebijakan politik Partai Kebangkitan Bangsa dalam penerapan ideologi, mabda siyasi dan kaderisasi partai.

Bab IV menelaah tentang mengapa Partai Kebangkitan Bangsa harus berlandaskan Mabda Siyasi, proses implementasi nilai-nilai yang ada dalam Mabda Siyasi terhadap setiap pengambilan kebijakan politik oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa serta membahas kebijakan apa saja yang sesuai dengan Mabda Siyasi dalam sistem politik bernegara, kebijakan publik dan kontribusi yang diberikan terhadap demokrasi di tengah masyarakat.

Bab kelima, kesimpulan dan saran merupakan bagian akhir dari penelitian ini atau sebagai penutup.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) pada 23 Juli 1998, draf *Mabda' Siyasi* PKB secara inheren mengadopsi nilai AD/ART NU, PKB ditransformasikan menjadi partai terbuka lintas eksklusivitas agama, suku, dan golongan guna memperluas basis elektoral di luar sosiologis Nahdliyin, PKB secara tegas memproklamasikan diri sebagai partai terbuka (*inclusive party*) yang melintasi batas-batas sekte agama, suku, dan golongan. Strategi inklusif ini dirumuskan untuk membangun koalisi kebangsaan yang pluralistik, sehingga mampu menghimpun simpati dan dukungan politik yang melampaui batas-basis massa tradisional NU.
2. *Mabda' Siyasi* sebagai landasan ideologis Partai Kebangkitan Bangsa bukan sekadar dokumen seremonial, melainkan ruh perjuangan yang memandu seluruh arah kebijakan, strategi politik, dan tata kelola partai. Pada dimensi aksiologis, *Mabda' Siyasi* PKB berdiri di atas landasan filosofis dan teologis yang menempatkan etika ketuhanan sebagai supremasi tertinggi dalam berpolitik. Mereka terikat oleh kewajiban moral untuk mempertanggungjawabkan mandat politiknya agar segala bentuk perebutan kekuasaan politik di PKB selalu bermuara pada kemaslahatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
3. Implementasi *Mabda' Siyasi* sebagai landasan ideologis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar

periode 2005–2024 merupakan sebuah manifesto politik dinamis yang berfungsi memandu seluruh arah kebijakan, strategi, dan tata kelola partai. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang dibedah dengan Teori Strukturasi Anthony Giddens, proses politik ini memperlihatkan hubungan timbal balik yang saling membentuk antara DPP PKB selaku agen dan kebijakan publik selaku struktur. Dalam praktiknya, nilai-nilai luhur bentukan rahim Nahdlatul Ulama (NU) termasuk prinsip universal *Maqashid al-Syari'ah* berhasil ditransformasikan oleh menjadi gerakan parpol terbuka yang melintasi sekat agama, suku, dan golongan. Karakteristik nasionalis-religius ini diperkuat oleh doktrin teologis bahwasanya kekuasaan hanyalah titipan ilahi, mempertanggungjawabkan mandatnya kepada rakyat sekaligus secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. SARAN

1. Rekomendasi untuk Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa perlu memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan internal agar implementasi *Mabda' Siyasi* tidak berhenti pada tataran wacana ideologis semata, tetapi benar-benar terukur dalam setiap pengambilan kebijakan politik. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah membentuk lembaga atau badan khusus di internal partai yang bertugas menilai kesesuaian antara setiap keputusan politik DPP Partai Kebangkitan Bangsa dengan nilai-nilai *Mabda' Siyasi*,
2. Rekomendasi untuk Anggota DPR dan Kader Partai Kebangkitan Bangsa di Lembaga Legislatif dan Eksekutif yang mengemban amanah di berbagai posisi strategis, baik di DPR RI, DPRD, maupun jabatan

eksekutif di tingkat pusat dan daerah, perlu senantiasa menjadikan kerangka *maqashid syariah* sebagai kompas dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik. Setiap produk legislasi yang didukung, setiap program pembangunan yang digagas, dan setiap kebijakan publik yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan lima perlindungan mendasar: jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Partai Kebangkitan Bangsa berdiri pada komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kelompok yang lemah dan terpinggirkan.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya, Bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik mengkaji lebih jauh tentang Partai Kebangkitan Bangsa dan Mabda' Siyasi, penelitian ini membuka beberapa celah penting yang layak dieksplorasi lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif... - Google Scholar. Diakses 24 Oktober 2024.
- Agussalim Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Al Bary, M. Dahlan, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arkola. 1995.
- Ali, Amar Akbar Ali. *Identitas Kota, Fenomena dan Permasalahannya*, Jurnal Ruang Volume 1 Nomor 1, 2009.
- Alvia, Lisna, dan Uin Syarif Hidayatullah. “pemikiran politik abdurrahman wahid (gus dur) dan pengaruhnya terhadap politik partai kebangkitan bangsa (pkb) setelah era reformasi 1998-2009,” 2015.
- Annisa. “Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut,” 2023.
- Arfani, Riza Noer dan Ndadari. *Kota dan Globalisasi: Menuju Yogyakarta Kreatif*.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum (Dari Konstruksi Sampai Implementasi)*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- ARMEDI, M. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet. I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Authenticity. *Creative City Planning Framework, a Supporting Document to the Agenda for Prosperity: Prospectus for a Great City*. 2008.

Blanchini, Franco and Charles Landry. *The Creative City: Indicators of a Creative City, a Methodolgy for Asseng Urban Viabilty and Vitality*, Comedia; Working Paper, 1994.

Bourdieu Pierree, Arena Produksi Kultural, “Sebuah Kajian Sosiologi Budaya”, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010).

BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2007.

Burke J. Peter, Stets E. Jan. *Identity Theory And Social Identity Theory*. 1998.

Castells, Manuel. *The Power of Identity The Information Age: Economy, Society and Culture: Vol. II, The Power of Identity*, Blackwell, Oxford. 2010.

Charon, Joel M. *Symbolic Interactionism: an introduction, an interpretation, an i integration*, edisi 6. Upper Saddle River N.J. Prentice Hall. 1998.

Denzin, Guba, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, penyunting: Agus Salim. 2001.

Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum (Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Indonesia 1945-1990)*, Cet. II, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2004.

Durkheime, Emile. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York: Pree Press. 1995.

El Fuadi, M. B. (2023). *Tata Ruang Perkotaan: Islam Dan Kebijakan Publik Persentuhan Antar Budaya Di Kabupaten Gresik* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Eriyanto. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS. 2004.

- Evans, Graeme. *Strategies for Creative Cities*, London: Clties Institute, London Metropolitan University, 2006.
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Press. 2011
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society*, cetakan keempat. Yogyakarta: Pedati.2011.
- Gleaser, Edward. *Triumph of The City*, London: Macmillan, 2011.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. IV, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.2009
- Hogg, Michael A. *The Sosial Identity Prespective: Intergroup Relation, Self-Conception, and Small Group*, *Sall Group Research*, Vol 35 No.3(June 2004), diakses tanggal 2 september 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center. 2011
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara. 1992
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Koesnoe, Mohammad, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Cet. I, Surabaya: Airlangga University Press. 2010.
- Kuswarno, Engkus. *Metode Penelitian Komunikasi: Etnografi Komunikasi*. 2008.
- Liliweri, Alo *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya* Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Angkasa. 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2007.

- Moser, M. *Menciptakan Merek Kohesif yang Dilihat, Didengar, dan Diingat*, Jakarta: Penerbit Erlangga 2006.
- Muhammad, Rusjdi Ali (2000). *Politik Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 106–123
- Nordholt, Henk Schulte. *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor. 2009.
- Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Prasetyo, Nocolaus Ade. Tradisi Kirab Kebo Kyai Slamet Keraton Kasunan. 017.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum. (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Giddens, Anthony. “Teori Struktural: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat.” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010.
- Hairunnisa, dan Wisda Aprilia Syaka. “Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan),” 29 Juli 2022.
- Herry-Priyono, B. *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.

- Mansur, Jumria. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (5 Desember 2021):
- Meyer, Thomas. "Peran partai politik dalam sebuah sistem demokrasi : sembilan tesis." 2012, 3, 2012.
- Saleh, Sirajuddin. "Analisis data kualitatif." Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.
<https://eprints.unm.ac.id/14856>.
- Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D," 2013.
- Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (25 Februari 2021): 25–36.
<https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.
- Syahri, Moch. "ANTHONY GIDDENS DAN TEORI STRUKTURASI." *Pascasarjana Universitas Airlangga*, 2015.
- Yuliadi, imamudin. "aspek ekonomi kebijakan otonomi daerah | yuliadi | Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan," April 2001.
- Iswadi, Iswandi. "Studi gerakan ideologi partai politik pada pemilu 2019." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7.1 (2020): 3-21.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan, and M. Chairil Akbar. "Pergulatan politik identitas partai-partai politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11.2 (2019): 169-186.
- Hasnu, Hasnu, and Firdaus Syam. "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB." *Syntax Idea* 3.7 (2021): 1620-1634.

- Putra, Eduard Awang Maha, et al. "Penguatan Ideologi Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 9.2 (2024): 423-449.
- Sumadinata, R. Widya. "Dinamika koalisi partai-partai politik di Indonesia menjelang dan setelah pemilihan presiden tahun 2014." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 1.2 (2016): 10.
- Jati, Peni. "Fungsi filsafat, agama, ideologi dan hukum dalam perkembangan politik di indonesia." *Yuridika* 31.1 (2016): 56-62.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan. "Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014." *Journal of Governance* 2.2 (2017).
- Andriana, Nina. "Arti penting ideologi bagi partai politik." *Jurnal Penelitian Politik* 7.2 (2010): 8-8.
- Firmanzah, Ph D. *Mengelola Partai Politik-Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Jannah, Maylisa Hidayatul. "Ideologi politik: pentingnya sebuah arti dan peran ideologi dalam partai politik." *Maylisa Hidayatul Jannah* (2021).
- Arfandy, Muh Farhan, and A. Rafika Maharani. "Penguatan Peran Partai Politik Di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik." *Majalah Hukum Nasional* 54.1 (2024): 83-102.
- Arfandy, Muh Farhan, and A. Rafika Maharani. "Penguatan Peran Partai Politik Di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik." *Majalah Hukum Nasional* 54.1 (2024): 83-102.

- Budiatri, Aisah Putri, et al. "Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi." *Jurnal Penelitian Politik* 14.2 (2017): 261-275.
- Yusuf, A. (2003). *Strategi politik DPC PKB Kota Bandung dalam meraih massa menjelang pemilu 2004* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Yudi Latif, "Transformasi PKB: Dari Jaringan Kultural ke Jaringan Fungsional".
- Romdhan, M., & Hasan, A. W. (2023). Kharisma Kharisma Kiai dalam Dunia Politik (Telaah Buku "Kiai di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa"). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 10(1), 101-127.
- Misrawi, Z. (2019). *The Maqashid al-Shariah and Public Policy in Indonesia: A Case Study of National Awakening Party (PKB)*. *Studia Islamika*, 26(3), 411-435.
- Moch. Nurhasim, "Pengaruh dan Kekuatan Kyai dalam rekrutmen Politik" dalam Syamsuddin Haris (ed), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-LIPI, 2005).
- Tabrozi, D. (2023). *Demokrasi Konstitusional Dalam Penyelenggaraan Negara (Studi Analisis Pemikiran KH. Wahab Chasbullah)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Fauzi, M. U. (2019). Implementasi Konsep Mabadi Khaira Ummah Nahdlatul Ulama Sebagai Bentuk Moderasi Islam di Kabupaten Nganjuk. *Tafhim Al-'Ilmi*, 11(1), 119-147.

- Tabrozi, D. (2023). *Demokrasi Konstitusional Dalam Penyelenggaraan Negara (Studi Analisis Pemikiran KH. Wahab Chasbullah)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Majid, Z. A. (2020). Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik). *Almarhalah| Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 19-28.

Peraturan Perundang-undangan Hierarki Regulasi Partai Politik:

UU Nomor 2/1999 Partai Politik (era reformasi awal)

UU Nomor 31/2002 Partai Politik

UU Nomor 2/2008 Partai Politik (induk berlaku)

UU Nomor 2/2011 Perubahan UU 2/2008

PP Nomor 5/2009 Bantuan Keuangan Parpol

PP Nomor 83/2012 Perubahan I

PP Nomor 5/2009 PP1/2018 Perubahan II PP 5/2009

Permen Nomor M.HH-04/2011 Teknis Pendaftaran Parpol